



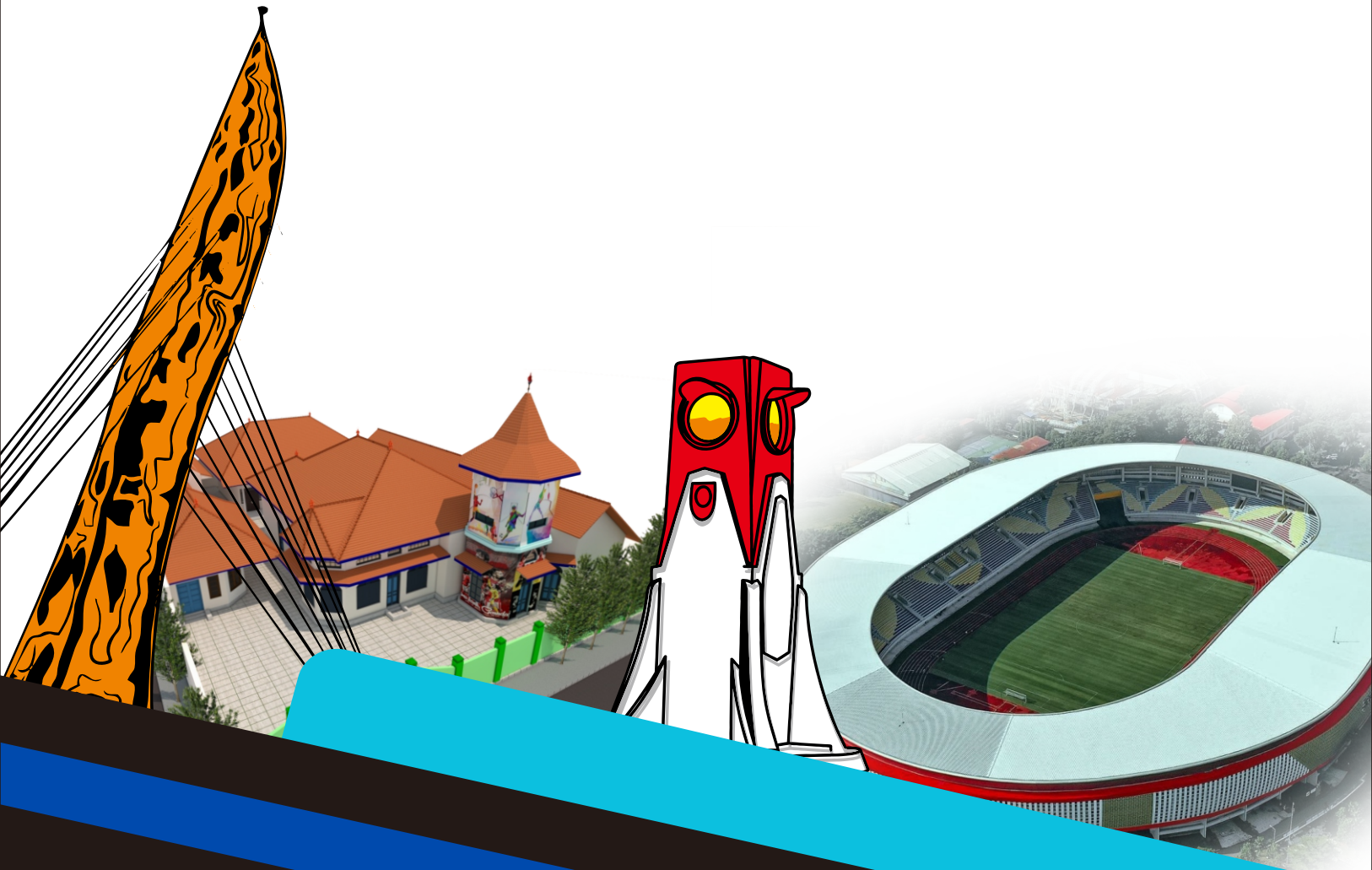
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
**#bangga
melayani
bangsa**

LKjIP 2023

Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta



bapenda
surakarta

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Surakarta
Telp (0271) 638893

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta. LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Surakarta, Januari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA



TULUS WIDAJAT SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720407 199703 1 005

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Organisasi.	1
B. Fungsi Strategis Perangkat Daerah.....	2
C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Perangkat Daerah.....	5
D. Kinerja dan Pelayanan.....	7
E. Sistematisasi Penyusunan LKjIP.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	9
B. Rencana Kinerja.....	12
C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Pengukuran, Evaluasi Pencapaian dan Analisis Kinerja.....	27
C. Realisasi Anggaran.....	53
D. Pencapaian Lainnya	56
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Strategi Peningkatan Kinerja ke Depan.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda Kota Surakarta.....	9
Tabel 2.2	Tujuan dan Target Sasaran Perangkat Daerah.....	11
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan Bapenda Kota Surakarta.....	12
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Perubahan Bapenda Kota Surakarta.....	13
Tabel 2.5	Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.....	14
Tabel 3.1	Predikat Capaian Kinerja.....	18
Tabel 3.2	Progres Capaian Antara target dan Realisasi Kinerja.....	19
Tabel 3.3	Capaian Indikator Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	23
Tabel 3.4	Capaian Indikator Persentase Kenaikan Penerimaan PAD.....	24
Tabel 3.5	Capaian Indikator Nilai PMPRB.....	25
Tabel 3.6	Capaian Nilai SAKIP, Nilai SPIP, Nilai SKM.....	26
Tabel 3.7	Pengukuran Capaian Sasaran Sasaran Strategis IKU.....	27
Tabel 3.8	Pengukuran Capaian Sasaran Perangkat Daerah ke 1.....	35
Tabel 3.9	Pengukuran Capaian Sasaran Perangkat Daerah ke 2.....	39
Tabel 3.10	Pengukuran Capaian Sasaran Program ke 1.....	42
Tabel 3.11	Pengukuran Capaian Sasaran Program ke 2.....	49
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Bapenda Kota Surakarta.....	53
Tabel 3.13	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Bapenda Kota Surakarta.....	1
Gambar 3.1	Akses QRIS pada SPPT PBB-P2.....	30
Gambar 3.2	Perjanjian Kerjasama dengan Bank Jateng.....	30
Gambar 3.3	Kegiatan Jemput Bola/Safari PBB-P2 di 54 Kelurahan.....	31
Gambar 3.4	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.....	31
Gambar 3.5	Kegiatan Pelayanan Pajak Daerah di CFD Slamet Riyadi.....	31
Gambar 3.6	Kegiatan Internalisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah..	32
Gambar 3.7	Kegiatan Diskusi Kelompok Terbatas.....	32
Gambar 3.8	Kegiatan Forum Konsultasi Publik.....	33
Gambar 3.9	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian..	33
Gambar 3.10	Bimtek Pelayanan Prima.....	34
Gambar 3.11	Sosialisasi Anti Korupsi dan Benturan Kepentingan Bersama Inspektorat Kota Surakarta.....	34
Gambar 3.12	Visit Bersama Wajib Pajak dengan KPP Pratama Kota Surakarta.....	37
Gambar 3.13	Bimtek Pelatihan Petugas Sadar Pajak Daerah.....	37
Gambar 3.14	Bimtek Pelatihan SIMPATDA.....	38
Gambar 3.15	Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah.....	38
Gambar 3.16	Foto Dokumen Perencanaan Bapenda Kota Surakarta.....	41
Gambar 3.17	Kegiatan Pemasangan alat TMD.....	44
Gambar 3.18	Kegiatan Monitoring Pajak Hiburan.....	45
Gambar 3.19	Dokumentasi Videotron Bapenda Kota Surakarta.....	42
Gambar 3.20	Kegiatan Pemasangan Stiker dan Penertiban Reklame.....	46
Gambar 3.21	Kegiatan Pengawasan Obyek Pajak Daerah dan Penagihan Piutang Pajak Daerah.....	46
Gambar 3.22	Dokumentasi Menjalin Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum.....	47
Gambar 3.23	Pemasangan Banner Tarif Pajak Restoran.....	47
Gambar 3.24	Kegiatan Pengundian Hadiah PBB-P2.....	47
Gambar 3.25	Kegiatan Penyerahan Hadiah PBB-P2 Tahap I.....	48
Gambar 3.26	Kegiatan Penyerahan Hadiah PBB-P2 Tahap II.....	48
Gambar 3.27	Kegiatan Diskusi Kelompok Terbatas Tahun 2023.....	52
Gambar 3.28	Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	52
Gambar 3.29	Penghargaan Gelar Inovasi dari Pemerintah Kota Surakarta.....	53

BAB I

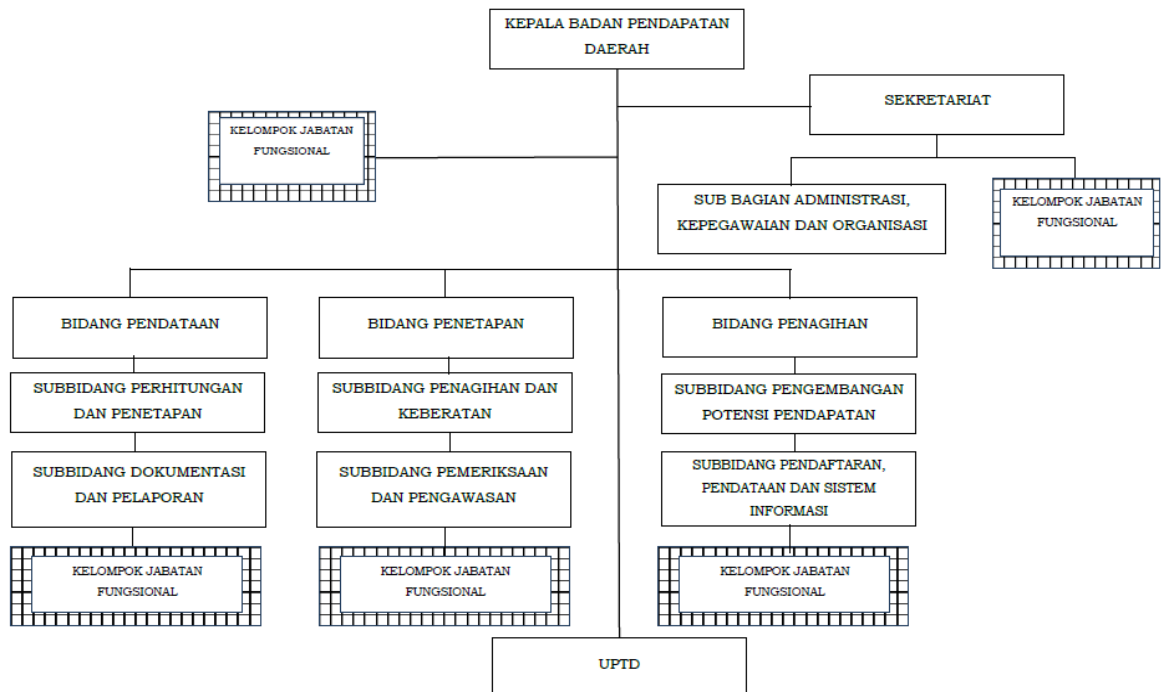
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Penetapan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan.
 2. Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Penagihan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
 2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan.
- e. Bidang Pendataan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan.
 2. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Sistem Informasi.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara rinci Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta terlihat dalam bagan organisasi sebagai berikut :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

B. Fungsi Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, bahwa Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta koordinasi dan sinkronisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta koordinasi dan sinkronisasi Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta koordinasi dan sinkronisasi Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta koordinasi dan sinkronisasi pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
5. pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, umum, kepegawaian dan organisasi; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kota Surakarta sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta koordinasi dan sinkronisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta koordinasi dan sinkronisasi Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta koordinasi dan sinkronisasi Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta koordinasi dan sinkronisasi pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, umum, kepegawaian dan organisasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen risiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset, serta pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik kehumasan dan kerjasama pada badan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyeleggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja badan;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan badan;
- c. penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah kewenangan badan;
- d. penyelenggaraan administrasi umum badan;
- e. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada badan;
- f. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup badan;
- g. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup badan;
- h. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa lingkup badan;

- i. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup badan;
- j. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik serta pengelolaan kepegawaian lingkup badan;
- k. penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
- l. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penetapan

Bidang Penetapan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait perhitungan dan penetapan, serta dokumentasi dan pelaporan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penetapan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis terkait perhitungan dan penetapan serta dokumentasi dan pelaporan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. penyelenggaraan perhitungan dan penetapan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah ;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait perhitungan dan penetapan serta dokumentasi dan pelaporan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait penagihan, keberatan, pemeriksaan dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penagihan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penagihan dan keberatan, pemeriksaan dan pengawasan;
- b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait penagihan dan keberatan;
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait penagihan dan keberatan, pemeriksaan dan pengawasan;
- d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pendataan

Bidang Pendataan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pengembangan potensi serta Pendapatan Asli Daerah serta pendaftaran, pendataan dan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pendataan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengembangan potensi serta pendaftaran, pendataan dan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta koordinasi dan sinkronisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pengembangan potensi serta pendaftaran, pendataan dan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta koordinasi dan sinkronisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pengembangan potensi pendaftaran, pendataan dan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta koordinasi dan sinkronisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dapat ditarik kesimpulan bahwa isu – isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai peraturan perundangan.
2. Belum Optimalnya Pendataan Potensi Pendapatan Daerah.
3. Belum Optimalnya Pemeriksaan dan Pengawasan terhadap Objek Pajak Daerah.
4. Masih terdapat piutang pajak daerah yang belum terbayarkan.
5. Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Belum optimalnya manajemen pengelolaan yaitu terkait dengan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana kantor, sistem teknologi informasi, sistem dan mekanisme kerja, serta motivasi, sikap dan perilaku yang mendukung terwujudnya *good governance*.

Permasalahan - permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui penyebabnya, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pendataan

- a. Keterlambatan pelaporan atas objek pajak;
- b. Tidak sinkronnya data yang diperoleh dilapangan dengan data yang dilaporkan secara *online*;
- c. Belum optimalnya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai peraturan perundangan yang baru;
- d. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang belum optimal;
- e. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan keadaan objek pajak.

2. Bidang Penagihan

- a. Ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya masih rendah;
- b. Penagihan Piutang Pajak Daerah kurang maksimal;
- c. Kurangnya penerapan sanksi yang efektif terhadap wajib pajak yang kurang kooperatif;
- d. Persebaran objek pajak dan kompleksitas permasalahan;
- e. Realisasi pencapaian target pajak daerah tidak tercapai.

3. Bidang Penetapan

- a. Akurasi pelaporan data objek pajak;
- b. Pelayanan pajak daerah kurang optimal;
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait regulasi perpajakan daerah;
- d. Belum optimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah Perizinan dan Pengelola Pajak Daerah dalam bentuk Pembinaan dan Rekonsiliasi data.

4. Sekretariat

- a. Kurang meratanya kapasitas masing – masing SDM
- b. Kurangnya peningkatan kapasitas SDM dengan mengikuti diklat/ bimtek;
- c. Kurang optimalnya penyusunan laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
- d. Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi yang terus berkembang.

D. Kinerja dan Pelayanan

1. Dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan - kebijakan pembangunan pemerintah daerah perlu didukung dengan program program dalam rangka peningkatan kapasitas yang berkelanjutan dalam berbagai kegiatan-kegiatan guna lebih memberdayakan daerah melalui :
 - Peningkatan pendapatan asli daerah;
 - Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
 - Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Anggaran belanja tersebut diprioritaskan untuk alokasi kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan potensi serta sarana dan prasarana pendapatan.
3. Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi berkewajiban menyelenggarakan sosialisasi secara terus menerus baik melalui media massa, *videotron* penyebaran brosur/*leaflet*, pemasangan spanduk, maupun secara langsung dengan masyarakat.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Modernisasi Sistem Perpajakan Daerah, antara lain :
 - Pemasangan *Terminal Monitoring Device* (TMD);
 - Integrasi Peta *Digital* PBB dengan Zona Nilai Tanah dari BPN dan nilai *history* PPh BPHTB dari KPP;
 - Pemasangan *QRIS* pada SPPT PBB-P2;
 - Pelayanan Jemput Bola / Safari PBB-P2;
 - Integrasi Perubahan Data SPPT PBB-P2 dengan Pencatatan SHM Tanah di BPN;
 - Implementasi *Porporasi Online*;
 - Implementasi *Billing Center*;
 - Pengembangan aplikasi SIMPATDA; dan
 - Pengembangan aplikasi E – Layanan.
5. Pembaharuan data wajib pajak dan objek pajak secara berkala.

E. Sistematika Penyusunan LKjIP

Sistematika penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum Organisasi
- B. Fungsi Strategis Perangkat Daerah
- C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Perangkat Daerah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Indikator Kinerja Perangkat Daerah
 1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 (Berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021–2026); dan
 2. Indikator dan target kinerja sasaran perangkat daerah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 dan/atau Cascading Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.
- B. Rencana Kinerja Tahun 2023
- C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Pencapaian Lainnya

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan dan Saran
- B. Strategi Peningkatan Kinerja ke Depan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2026). Dalam mewujudkan **Misi “Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong-royong dan kebhinekaan”**, Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta memiliki indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel. 2.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN
Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	$Y = \frac{PAD}{APBD} \times 100\%$ <p>Y = Tingkat Kemandirian</p>
		<p>• Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah dan hal tersebut diukur dari Tingkat Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rasio PAD terhadap APBD. Keberhasilan dalam meningkatkan PAD nya secara nyata, dan mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.</p>

		<p>• Definisi Operasional :</p> <p>Tingkat Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota adalah tingkat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rasio PAD terhadap APBD. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. Jika tingkat kemandirian suatu daerah “rendah sekali” (0-25 %), dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat kemandirian “rendah” (>25-50 %), campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kategori “sedang” (>50-75 %), menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori “tinggi” (>75%), bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.</p>
--	--	---

Sumber: Perwali IKU Nomor 29 Tahun 2021 hal. 90

Tabel 2.2
Tujuan dan Target Sasaran Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Terwujudnya Birokrasi Yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif (sesuai dengan IKU)		Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	32	34	36	38
	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	6,1	6,1	6,1	6,1
	Meningkatkan Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Agar Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB	35.15	n/a	n/a	n/a
		Nilai SAKIP	85	85	85	85
		Nilai SKM	92	93	94	95
		Nilai SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4
		Nilai Maturitas Kelembagaan	48	52	52	52

Sumber: Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Tabel. 2.3

RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	32 %
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	6,1 %
3	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar efektif dan efisien	Nilai SAKIP	85
		Nilai SPIP	3,2
		Nilai SKM	92
		Nilai Maturitas Kelembagaan	48

C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semua instansi pemerintah wajib menyusun LKjIP. Selanjutnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, sebagai berikut:

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA

Sasaran Strategis / Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	
		Sebelum	Setelah
Terwujudnya Birokrasi yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	32 %	32 %
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	6,1 %	6,1 %
Meningkatkan Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Pembangunan	Nilai PMPRB	35,15	35,15
Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Daerah	6,1 %	6,1 %
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar efektif dan efisien	Nilai SAKIP	85	85
	Nilai SKM	92	92
	Nilai SPIP	3,2	3,2

No.	Program	Anggaran (Rp)		Ket.
		Sebelum	Setelah	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.860.824.634	29.638.941.651	APBD
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.145.699.000	8.339.609.000	APBD P
	Total	51.006.523.634	37.978.550.651	

Sumber: PK Perubahan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023

Tabel. 2.5

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 PERUBAHAN
BAPENDA KOTA SURAKARTA**

Kode Permendagri 90/2019	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		43.790.848.282
5.02-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		29.638.941.651
5.02-01.2-01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		303.220.000
5.02-01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.900.000
5.02-01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	244.920.000
5.02-01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.400.000
5.02-01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		19.077.830.551
5.02-01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.072.830.551
5.02-01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	5.300.000
5.02-01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		846.908.000
5.02-01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	368.100.000
5.02-01.2.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	397.098.000
5.02-01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44.895.000
5.02-01.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	36.815.000

5.02-01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.239.047.100
5.02-01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.141.000
5.02-01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.063.752.100
5.02-01.2.06.004	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	428.075.000
5.02-01.2.06.005	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.085.000
5.02-01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	407.400.000
5.02-01.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	130.554.000
5.02-01.2.06.011	Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	68.040.000
5.02-01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		91.141.000
5.02-01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	91.141.000
5.02-01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.850.981.000
5.02-01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.925.000
5.02-01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	346.456.000
5.02-01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	390.739.000
5.02-01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.070.861.000
5.02-01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.229.814.000
5.02-01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	640.696.000
5.02-01.2.09.005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	9.895.000
5.02-01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	484.790.000

5.02-01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94.433.000
5.02-04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan Pendapatan Pajak Daerah	8.339.609.000
5.02-04.2.01	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan Pendapatan Pajak Daerah	8.339.609.000
TOTAL PAGU			37.978.550.651

Sumber: Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kualitas / kuantitas hasil (*outcome*) yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk / jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada Tahun Anggaran 2023, Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

- a) Jika semakin tingginya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Setiap capaian kinerja diberi predikat dengan menggunakan pengukuran skala ordinal dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1
Predikat Capaian Kinerja

No	Predikat	Nilai	Mean
1	Sangat Berhasil	$n > 85$	92,5
2	Berhasil	$70 < n \leq 85$	77,5
3	Cukup Berhasil	$55 < n \leq 70$	62,5
4	Tidak Berhasil	$n < 55$	27,5

n = capaian

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2023 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (jika ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis/ program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan untuk memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Progres capaian antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.2

Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja											
			Target	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV		
									Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15=14:10)	(16)	(17)	(18=17:11)	(19)	(20)	(21=20:12)	(22)	(23)	(24=23:13)	(25)
1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	32	%	32	32	32	32	32,52	101,63	Sangat Berhasil	30,13	94,16	Sangat Berhasil	30,53	95,41	Sangat Berhasil	32,36	101,13	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	6,1	%	6,1	6,1	6,1	6,1	8,46	138,69	Sangat Berhasil	9,8	160,66	Sangat Berhasil	5,4	88,52	Sangat Berhasil	2,08	34,1	Tidak Berhasil
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	6,1	%	6,1	6,1	6,1	6,1	8,46	138,69	Sangat Berhasil	9,8	160,66	Sangat Berhasil	5,4	88,52	Sangat Berhasil	2,08	34,1	Tidak Berhasil
4	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penghitungan Potensi Sumber Pendapatan Daerah yang Baru	9	Dok	2	4	7	9	2	100	Sangat Berhasil	4	100	Sangat Berhasil	6	85,71	Sangat Berhasil	9	100	Sangat Berhasil
		Capaian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100	%	100	100	100	100	100,97	100,97		98,62	98,62		99,57	99,57		84,18	84,18	
		Persentase Penurunan Piutang Pajak Daerah	10	%	2	4	8	10	7	350		9	225		12	150		12	120	
5	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	Dok	1	2	3	2	1	100	Sangat Berhasil	2	100	Sangat Berhasil	3	100	Sangat Berhasil	2	100	Sangat Berhasil
6	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4	Laporan	1	2	3	4	1	100	Sangat Berhasil	2	100	Sangat Berhasil	3	100	Sangat Berhasil	4	100	Sangat Berhasil
7	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4	Laporan	1	2	3	4	1	100	Sangat Berhasil	2	100	Sangat Berhasil	3	100	Sangat Berhasil	4	100	Sangat Berhasil
8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4	Dok	1	2	3	4	1	100	Sangat Berhasil	2	100	Sangat Berhasil	3	100	Sangat Berhasil	4	100	Sangat Berhasil
9	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4	Dok	1	2	3	4	1	100	Sangat Berhasil	2	100	Sangat Berhasil	3	100	Sangat Berhasil	4	100	Sangat Berhasil
10	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4	Dok	1	2	3	4	1	100	Sangat Berhasil	2	100	Sangat Berhasil	3	100	Sangat Berhasil	4	100	Sangat Berhasil
11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10	unit	0	0	6	10	0	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	6	100	Sangat Berhasil	10	100	Sangat Berhasil

LKjIP - Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

12	Meningkatkan Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Agar Efektif dan Efisien	Nilai Maturitas Kelembagaan	48	Angka	48	48	48	48	52	108,33	Sangat Berhasil	52	108,33	Sangat Berhasil	52	108,33	Sangat Berhasil	52	108,33	Sangat Berhasil
		Nilai PMPRB	35,15	Angka	35,15	35,15	35,15	35,15	34,42	97,92		34,42	97,92		34,42	97,92				
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	85	Angka	85	85	85	85	74,6	87,76	Sangat Berhasil	74,6	87,76	Sangat Berhasil	74,6	87,76	Sangat Berhasil	74,6	87,76	Sangat Berhasil
		Nilai SPIP	3,2	Angka	3,2	3,2	3,2	3,2	3,96	123,75		3,96	123,75		3,96	123,75				
		Nilai SKM	92	Angka	92	92	92	92	90,17	98,01		90,62	98,5		90,77	98,66				
		Nilai PMPRB	35,15	Angka					35,15	100			100			100				
		Nilai Maturitas Kelembagaan	48	Angka					48	100			100			100				
14	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil
15	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	1	2	3	5	1	100	Sangat Berhasil	2	100	Sangat Berhasil	3	100	Sangat Berhasil	5	100	Sangat Berhasil
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	Laporan	1	2	3	4	1	100	Sangat Berhasil	2	100	Sangat Berhasil	3	100	Sangat Berhasil	4	100	Sangat Berhasil
17	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	1	2	3	4	1	100	Sangat Berhasil	2	100	Sangat Berhasil	3	100	Sangat Berhasil	4	100	Sangat Berhasil
18	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil
19	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43	orang	44	44	44	43	44	100	Sangat Berhasil	44	100	Sangat Berhasil	44	100	Sangat Berhasil	43	100	Sangat Berhasil
20	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	1	2	3	4	1	100	Sangat Berhasil	2	100	Sangat Berhasil	3	100	Sangat Berhasil	4	100	Sangat Berhasil
21	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil
22	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5	Paket	0	0	2	5	0	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	2	100	Sangat Berhasil	5	100	Sangat Berhasil
23	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dok	1	2	3	4	1	100	Sangat Berhasil	2	100	Sangat Berhasil	3	100	Sangat Berhasil	4	100	Sangat Berhasil

LKjIP - Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

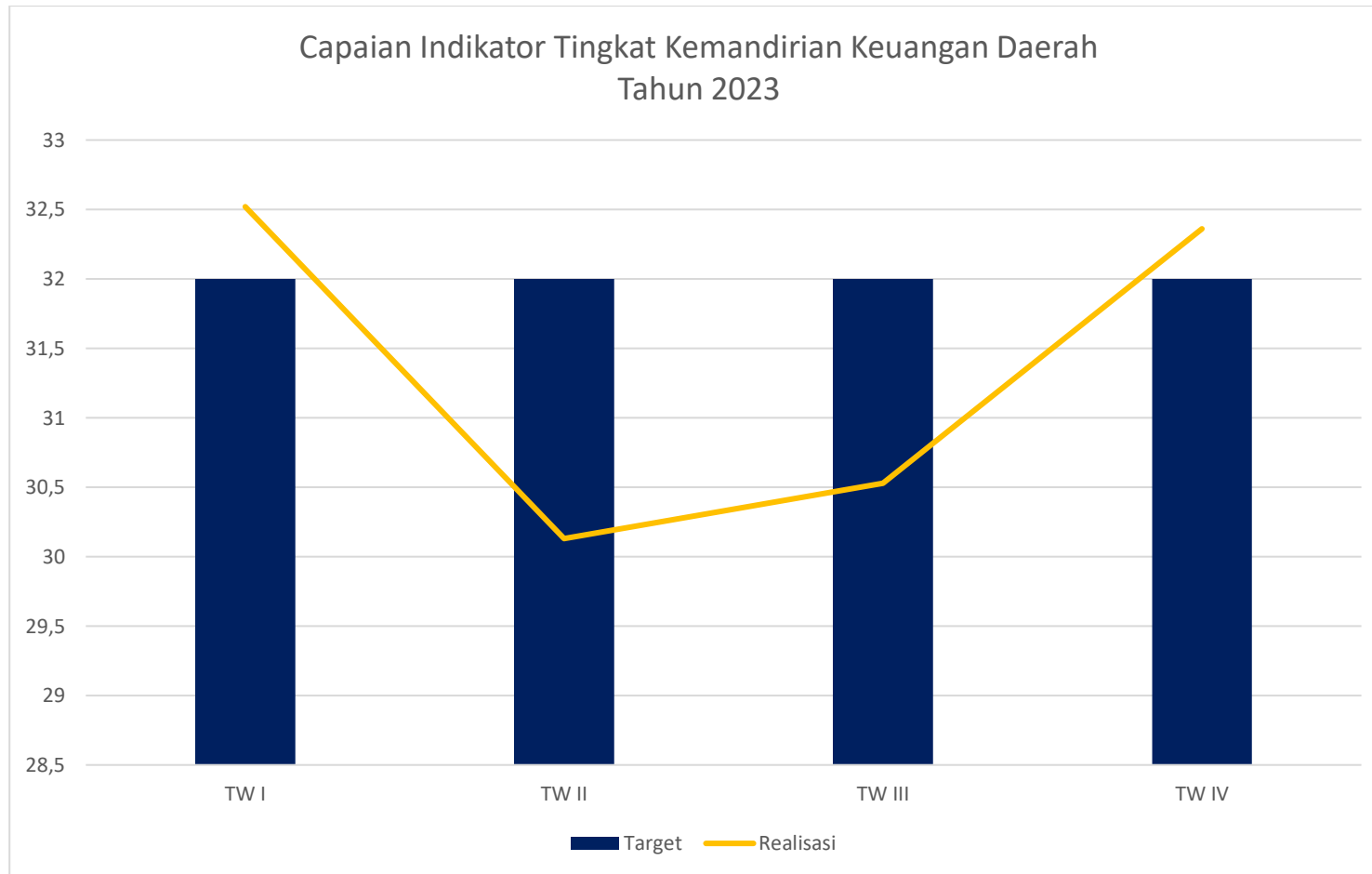
24	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110	org	0	0	0	110	0	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	110	100	Sangat Berhasil
25	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	110	org	0	0	0	110		100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	110	100	Sangat Berhasil
26	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100	%	0	0	0	100	0	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil
27	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	unit	0	0	0	3	0	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	3	100	Sangat Berhasil
28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	40	unit	40	40	40	40	40	100	Sangat Berhasil	40	100	Sangat Berhasil	40	100	Sangat Berhasil	40	100	Sangat Berhasil
30	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Unit	0	0	0	1	0	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	1	100	Sangat Berhasil
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	0	1	2	3	0	100	Sangat Berhasil	1	100	Sangat Berhasil	2	100	Sangat Berhasil	3	100	Sangat Berhasil
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	127	unit	127	127	127	127	127	100	Sangat Berhasil	127	100	Sangat Berhasil	127	100	Sangat Berhasil	127	100	Sangat Berhasil
33	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil
34	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	0	0	1	1	1	0	Tidak Berhasil	1	0	Tidak Berhasil	1	100	Sangat Berhasil	1	100	Sangat Berhasil
35	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	0	1	2	1	0	100	Sangat Berhasil	1	100	Sangat Berhasil	2	100	Sangat Berhasil	1	100	Sangat Berhasil
36	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	0	1	2	3	0	100	Sangat Berhasil	1	100	Sangat Berhasil	2	100	Sangat Berhasil	3	100	Sangat Berhasil
37	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	1	2	3	4	1	100	Sangat Berhasil	2	100	Sangat Berhasil	3	100	Sangat Berhasil	4	100	Sangat Berhasil
38	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dok	0	0	0	1	0	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	1	100	Sangat Berhasil
39	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	1	2	3	4	1	100	Sangat Berhasil	2	100	Sangat Berhasil	3	100	Sangat Berhasil	4	100	Sangat Berhasil

LKjIP - Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

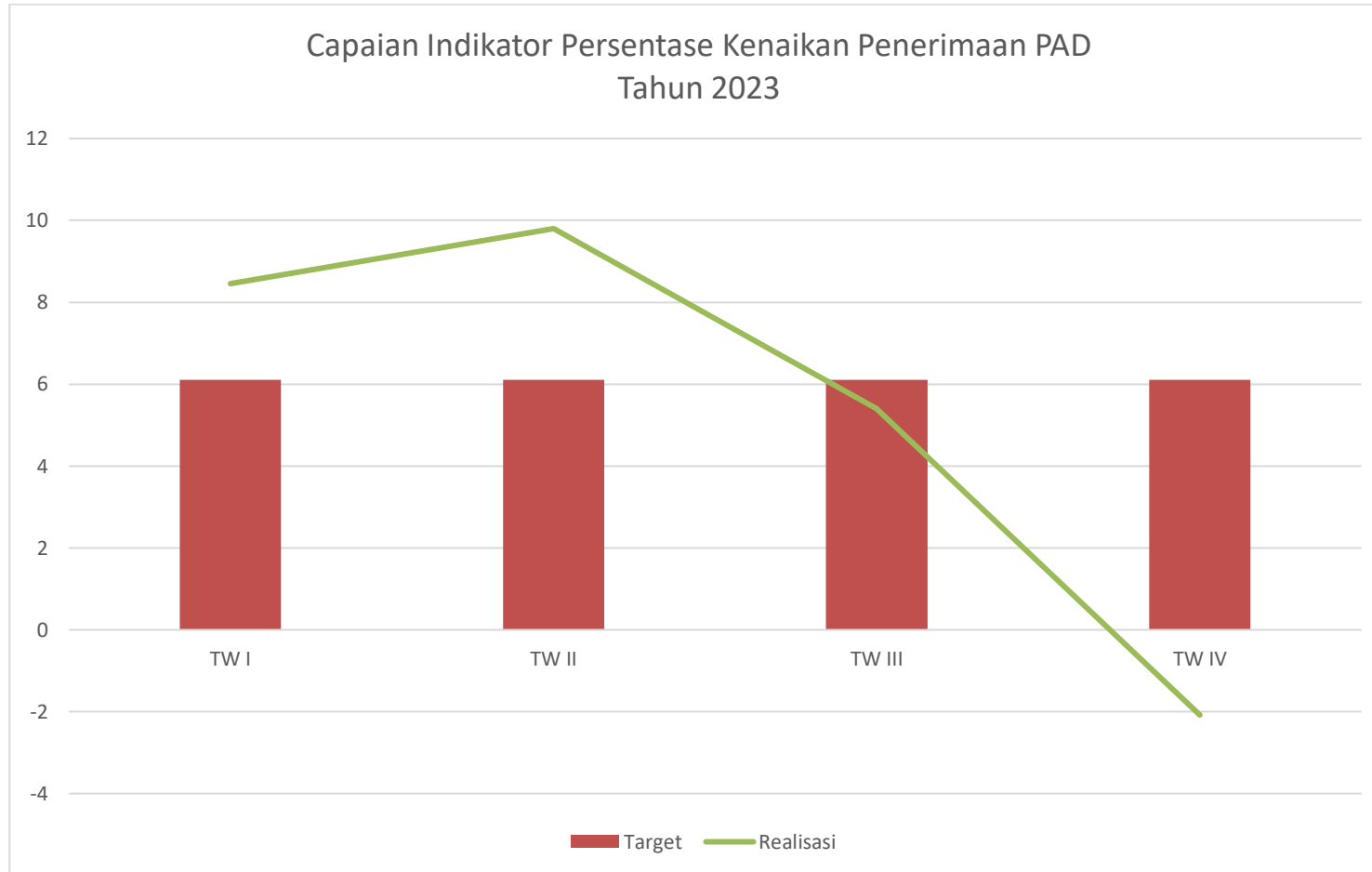
40	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	1	2	3	4	1	100	Sangat Berhasil	2	100	Sangat Berhasil	3	100	Sangat Berhasil	4	100	Sangat Berhasil
41	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang sarana prasara aparaturn	100	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil
42	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	1	2	3	4	1	100	Sangat Berhasil	2	100	Sangat Berhasil	3	100	Sangat Berhasil	4	100	Sangat Berhasil
43	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	1	2	3	4	1	100	Sangat Berhasil	2	100	Sangat Berhasil	3	100	Sangat Berhasil	4	100	Sangat Berhasil
44	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	1	2	3	4	1	100	Sangat Berhasil	2	100	Sangat Berhasil	3	100	Sangat Berhasil	4	100	Sangat Berhasil
45	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	1	2	3	4	1	100	Sangat Berhasil	2	100	Sangat Berhasil	3	100	Sangat Berhasil	4	100	Sangat Berhasil

Tabel 3.3

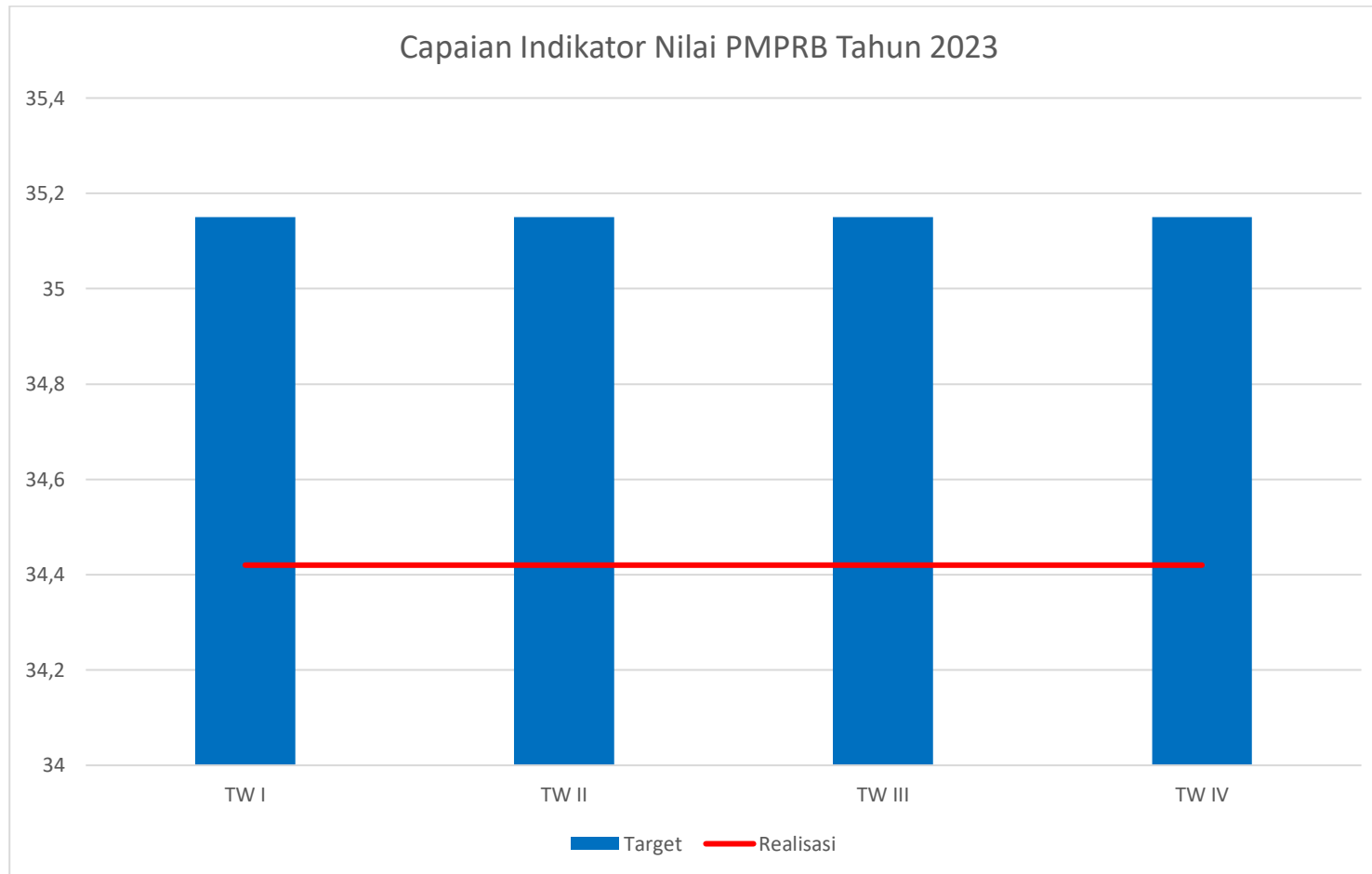
Capaian Indikator Antara Target dan Realisasi Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023



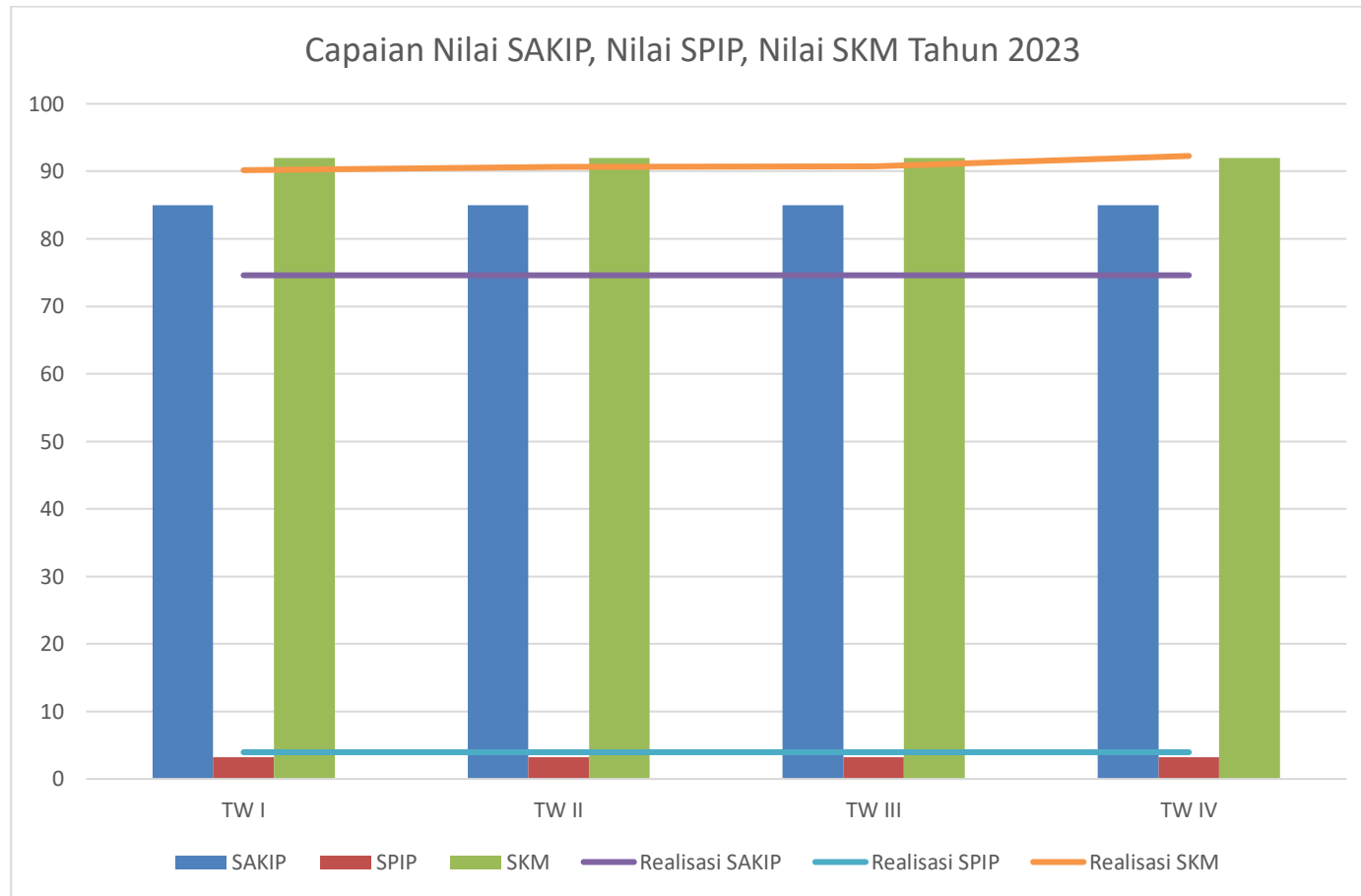
Tabel 3.4
Capaian Indikator Antara Target dan Realisasi Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023



Tabel 3.5
Capaian Indikator Antara Target dan Realisasi Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023



Tabel 3.6
Capaian Indikator Antara Target dan Realisasi Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023



B. Pengukuran, Evaluasi Pencapaian dan Analisis Kinerja

Analisis data pengukuran capaian sasaran pada Hasil Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN STARTEGIS IKU
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

Sasaran Strategis : Terwujudnya Birokrasi yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif										
Indikator Kinerja (IKU)	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)		Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	%	30	31	103,33	32	32,36	101,13	38	85,16	Sangat Berhasil

- Perhitungan Realisasi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah:

$$Y = \frac{PAD}{APBD} \times 100\%$$

$$Y = \frac{Rp\ 634.013.767.586}{Rp\ 1.959.482.412.447} \times 100\%$$

$$Y = 32,36 \%$$

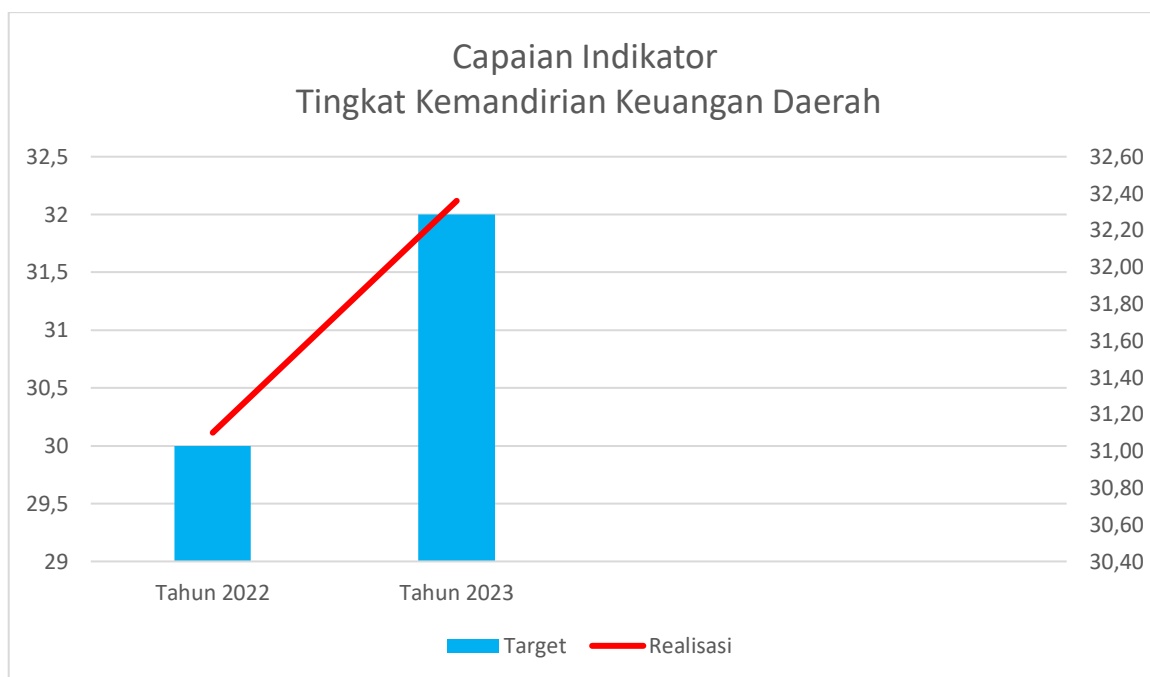
*) Sumber LRA BPKAD Kota Surakarta Tahun 2023

- Perhitungan Persentase Capaian Realisasi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah :

$$\text{Capaian Realisasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Realisasi} = \frac{32,36}{32} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Realisasi} = 101,13 \%$$



a. Capaian Kinerja

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah merupakan indikator sasaran yaitu Terwujudnya Birokrasi yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Kemudian Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah ini diturunkan menjadi indikator tujuan Perangkat Daerah pada dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas untuk capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta pada Tahun 2023 yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah untuk realisasi Tahun 2023 capaiannya menunjukkan predikat **Sangat Berhasil**.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Tahun 2023 bisa dikatakan sangat berhasil karena mencapai 101,13% dari target yang ditentukan, hal tersebut merupakan keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan meliputi: **Peningkatan Pendapatan PAD dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah.**

Analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan :

1. Intensifikasi dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak dan menyusun sistem informasi dan prosedur pengelolaan pajak daerah.
2. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan pajak daerah.
3. Kerjasama dengan perbankan untuk pembayaran pajak daerah secara online (Bank Jateng, BNI, Bank Mandiri, BCA, BTN, Bank Jabar).
4. Penyampaian informasi dan sosialisasi secara elektronik (*website* dan sosial media).
5. Meningkatkan fungsi pengawasan dan koordinator retribusi daerah.

c. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas 2 (dua) yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023 realisasi biaya termasuk program penunjang untuk mendukung indikator Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah Rp. 634.013.767.586 sementara target biaya untuk semua program yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 782.497.439.588. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level indikator kinerja utama adalah **81,02%**. Persentase efisiensi ini secara teori dapat diasumsikan bahwa pada Tahun 2023 secara umum terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah meliputi :

1. Modernisasi dan Digitalisasi sistem pajak/ retribusi daerah (perforasi *manual* diganti perforasi *online*, digitalisasi pembayaran retribusi, *billing center* retribusi, *upgrade* sistem pajak daerah) Peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar unit SKPD terkait;
2. Penyusunan Perda dan Perwali;
3. Sosialisasi Peraturan;
4. Pemeriksaan dan Penertiban;
5. Monitoring dan Evaluasi;
6. Pengembangan SDM;
7. Melaksanakan upaya Jemput Bola/Safari PBB;
8. Optimalisasi Pembayaran Pajak Daerah.

Adapun pencapaian dari setiap program/ kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini:

1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta sebesar Rp. 8.399.609.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.601.025.817 dengan persentase realisasi 79,15%. Adapun anggaran tersebut diatas untuk mendukung sasaran strategis dalam rangka Terwujudnya Birokrasi yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif dengan indikatornya yaitu **Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah** dengan realisasi **32,36%**.

Berikut beberapa dokumentasi dari kegiatan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah :

- a. Pembayaran Pajak secara online melalui beberapa kemudahan serta pelayanan yang telah disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, antara lain :
- AQ PADAMU : Akses QRIS Pajak Daerah Mudah pada SPPT PBB-P2;
 - Pembayaran pajak daerah melalui ATM;
 - Pembayaran pajak daerah melalui internet/ *mobile* banking.

PERMINTA KOTA SURAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA

PEMBETULAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2023 PERKOTAAN

NO SPPT (NPD) 33.72.030.008.009.0066.0
 FLS 010231132114TR0213501R/044

LEKAS OBJEK PAJAK: RT. 002 RW. 04 SANGKRAH PASAR KILINON SURAKARTA
 NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK: TUKIJO KP. TEGALREJO RT. 002 RW. 04 SANGKRAH SURAKARTA

OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BLUMI	052	067	802.000	41.704.000
BANGUNAN	052	025	595.000	30.940.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB				72.644.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB P2				62.644.000
PBB P2 yang Terhutang				0,10 % x 62.644.000 = 62.644
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				62.644
INAM PULUH DUA RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH EMPAT RUPIAH				

INFORMASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

TAHUN	POKOK	BUNGA/DENDA	KEKURANGAN PEMBAYARAN

QRIS:

Catatan : Pajak terhutang dikenakan bunga sebesar 2% perbulan, terhitung sejak jatuh tempo SPPT

TGL JATUH TEMPO 30 SEP 2023

TEMPAT PEMBAYARAN :
 BANK JATENG, QRIS, BNI, MANDIRI,
 BCA, BJB, BTN, TOKOPEDIA, LUMIA,
 BUKALAPAK, SHORPE, INDOMART,
 ALFAMART

SURAKARTA 10 FEB 2023
 A.P. WAKIL DAERAH SURAKARTA
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kota Surakarta

TUKIJO, NID. JAT. SB. M. 61.
 NIP. 197204071997031005

SPPT DAN SPPT PBB
 BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK

NAMA WP : TUKIJO
 Letak Objek Pajak : SANGKRAH
 PASAR KILINON
 NPD : 33.72.030.008.009.0066.0
 SPPT Tahun/Rp : 2023 / 62.644

Dikirimnya tgl :
 Tanda Tangan :
 Nama Terang :

Gambar. 3.1 – Akses QRIS pada SPPT-PBB-P2

b. Kerjasama dengan Perbankan

Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta juga telah melaksanakan kerjasama dengan beberapa bank.



Gambar 3.2 – Perjanjian Kerjasama dengan Bank Jateng

c. Mekanisme Penagihan Pajak Daerah dengan Jemput Bola / Safari PBB-P2.



Gambar 3.3 – Kegiatan Jemput Bola / Safari PBB-P2 di 54 Kelurahan

d. Bapenda Kota Surakarta melaksanakan audit kepada wajib pajak daerah bersama aparat penegak hukum pada kegiatan pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah.



Gambar 3.4 – Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah bersama Aparat Penegak Hukum

e. Bapenda Kota Surakarta melaksanakan kegiatan pelayanan pajak daerah dan perubahan data pajak daerah di CFD (Car Free Day) Slamet Riyadi



Gambar 3.5 – Kegiatan Pelayanan Pajak Daerah di CFD Slamet Riyadi

f. Internalisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Gambar 3.6 – Kegiatan Internalisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta sebesar Rp. 29.638.941.651 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.561.582.627 dengan persentase realisasi 66,00%. Adapun anggaran tersebut diatas untuk mendukung sasaran Program dalam rangka Meningkatnya upaya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Surakarta dengan indikatornya yaitu Nilai SAKIP dengan realisasi 74,60, Nilai SKM dengan realisasi 92,27, Nilai SPIP dengan realisasi 3,96.

Berikut beberapa dokumentasi dari kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :



Gambar 3.7 – Kegiatan Diskusi Kelompok Terbatas Bapenda Kota Surakarta



Gambar 3.8 – Kegiatan Forum Konsultasi Publik Bapenda Kota Surakarta



Gambar 3.9 – Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaiaan



Gambar 3.10 – Bimtek Pelayanan Prima Bapenda Kota Surakarta



Gambar 3.11 – Sosialisasi Anti Korupsi dan Benturan Kepentingan bersama Inspektorat Kota Surakarta

Tabel 3.8

PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KE-1
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

Sasaran Perangkat Daerah ke 1 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah										
Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)		Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	%	6,1	8,46	138,7	6,1	-2,08	-34,10	6,1	-559,02	Tidak Berhasil

- Perhitungan Persentase Kenaikan Penerimaan PAD :

$$\text{Kenaikan Penerimaan PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD 2023} - \text{Realisasi PAD 2022}}{\text{Realisasi PAD 2022}} \times 100\%$$

$$\text{Kenaikan Penerimaan PAD} = \frac{634.013.767.586 - 647.440.585.331}{\text{Rp } 647.440.585.331} \times 100\%$$

$$\text{Kenaikan Penerimaan PAD} = -2,08 \%$$

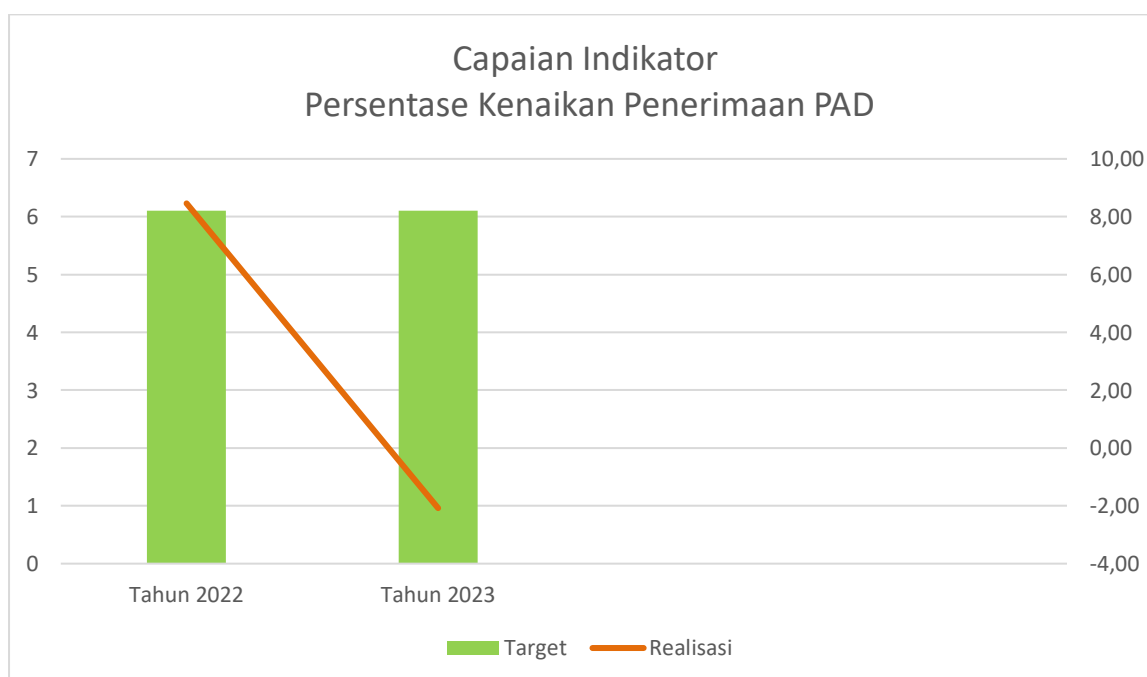
*Sumber LRA BPKAD Kota Surakarta Tahun 2023

- Perhitungan Persentase Capaian Realisasi Kenaikan Penerimaan PAD:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{-2,08}{6,1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = -34,10 \%$$



a. Capaian Kinerja

Persentase Kenaikan Penerimaan PAD merupakan indikator sasaran strategis yaitu Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas untuk capaian indikator sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta pada Tahun 2023 yaitu **Persentase Kenaikan Penerimaan PAD** untuk realisasi Tahun 2023 capaiannya menunjukkan predikat **Tidak Berhasil**.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja

Persentase Kenaikan Penerimaan PAD yaitu Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2023 bisa dikatakan tidak berhasil karena mencapai **-2,08%** dari target yang ditentukan, hal tersebut merupakan keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan meliputi:

1. Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah
 - a. Penyederhanaan prosedur dan modernisasi (komputerisasi sistem);
 - b. Penyempurnaan landasan hukum peraturan pengenaan pajak dan retribusi daerah;
 - c. Sosialisasi dan bimtek pendapatan pajak daerah;
 - d. Peningkatan pengawasan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - e. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar unit SKPD terkait;
 - f. Peningkatan kualitas SDM;
 - g. Melaksanakan upaya jemput bola ke wajib pajak;
 - h. Pemberian rangsangan berupa hadiah/penghargaan bagi wajib pajak yang tertib.
2. Ekstensifikasi Pajak Daerah
 - a. Updating dan optimalisasi pemanfaatan data pajak daerah;
 - b. Pengkajian atas potensi pajak dan retribusi daerah;
 - c. Optimalisasi pemungutan pendapatan terutama dari pajak daerah.

c. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas 2 (dua) yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023 realisasi biaya termasuk program penunjang untuk mendukung indikator Persentase Kenaikan Penerimaan PAD adalah Rp. 634.013.767.586 sementara target biaya untuk semua program yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 782.497.439.588. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level indikator sasaran strategis adalah **81,02%**. Persentase efisiensi ini secara teori dapat diasumsikan bahwa pada Tahun 2023 secara umum terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan program yang mendukung keberhasilan sasaran strategis Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta sebesar Rp. 8.399.609.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.601.025.817 dengan persentase realisasi 79,15%. Adapun anggaran tersebut diatas untuk mendukung sasaran Program dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan indikatornya yaitu Persentase Kenaikan Penerimaan PAD dengan realisasi **-2,08%**.

Berikut beberapa dokumentasi dari kegiatan yang menunjang Program Pengelolaan Pendapatan Daerah :



Gambar 3.12 – Visit Bersama Wajib Pajak dengan KPP Pratama Kota Surakarta



Gambar 3.13 – Bimtek Pelatihan Petugas Sadar Pajak Bapenda Kota Surakarta



Gambar 3.14 – Bimtek Pelatihan SIMPATDA Bapenda Kota Surakarta



Gambar 3.15 – Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah

Tabel 3.9
 PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KE-2
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

Sasaran Perangkat Daerah ke 2 : Meningkatkan Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Pembangunan										
Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023*			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)		Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
Nilai PMPRB	%	35,15	34,17	97,21	35,15	34,42	97,92	35,15	100	Sangat Berhasil

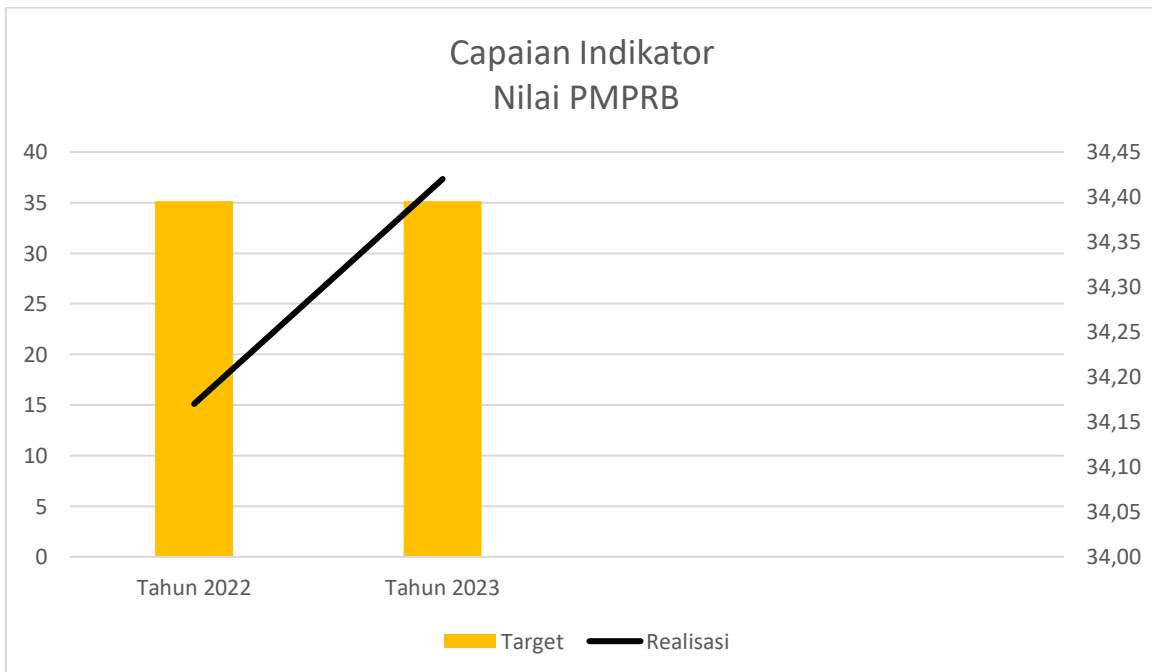
- Perhitungan Persentase Capaian Nilai PMPRB:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{34,42}{35,15} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = 97,92 \%$$

*Sumber LKE PMPRB Inspektorat Kota Surakarta 2023



a. Capaian Kinerja

Nilai PMPRB merupakan indikator sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Pembangunan yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas untuk capaian indikator sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta pada Tahun 2023 yaitu **Nilai PMPRB** untuk realisasi Tahun 2023 capaiannya menunjukkan predikat **Sangat Berhasil**.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja

Nilai PMPRB yaitu Meningkatkan Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Pembangunan pada Tahun 2023 bisa dikatakan sangat berhasil karena mencapai **97,92%** dari target yang ditentukan, hal tersebut merupakan keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan meliputi:

1. Melaksanakan reviu dan perbaikan atas Standar Pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholder (antara lain tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat pengelolaan pengaduan;
2. Mengintegrasikan media konsultasi dan pengaduan secara offline maupun online dengan SP4N-LAPOR;
3. Melakukan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja organisasi;
4. Membuat Peta Strategis (Kerangka Logis) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh organisasi.

c. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas 2 (dua) yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023 realisasi biaya termasuk program penunjang urusan pemerintahan daerah pada kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah untuk mendukung indikator Nilai PMPRB adalah Rp. 258.670.500,00 sementara target biaya untuk semua program yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 303.220.000,00.

Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level indikator sasaran strategis adalah **85,31%**. Persentase efisiensi ini secara teori dapat diasumsikan bahwa pada Tahun 2023 secara umum terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya biaya.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan program yang mendukung keberhasilan sasaran strategis ke 2 (dua) yaitu Meningkatkan Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Pembangunan.

Pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 29.638.941.651,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.561.582.627,00 dengan realisasi capaian **66,00%**. Berikut beberapa dokumentasi dari kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :



Gambar 3.16 – Foto Dokumen Perencana Bapenda Kota Surakarta

Tabel 3.10
PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN PROGRAM KE-1
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

Sasaran Program ke 1 : Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah										
Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)		Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
Persentase Kenaikan Pajak Daerah	Rp (Milyar)	6,1	60,30	988,54	6,1	7,89	129,34	6,1	100	Sangat Berhasil

▪ Perhitungan Persentase Realisasi Kenaikan Pajak Daerah :

$$\text{Kenaikan Target Pajak Daerah} = \frac{\text{Target Pajak Daerah Tahun 2023} * - \text{Target Pajak Daerah Tahun 2022}}{\text{Target Pajak Daerah Tahun 2022}} \times 100\%$$

$$\text{Kenaikan Target Pajak Daerah} = \frac{\text{Rp 524.045.000.000} - \text{Rp 408.526.805.553}}{\text{Rp 408.526.805.553}} \times 100\%$$

$$\text{Kenaikan Target Pajak Daerah} = 7,89 \%$$

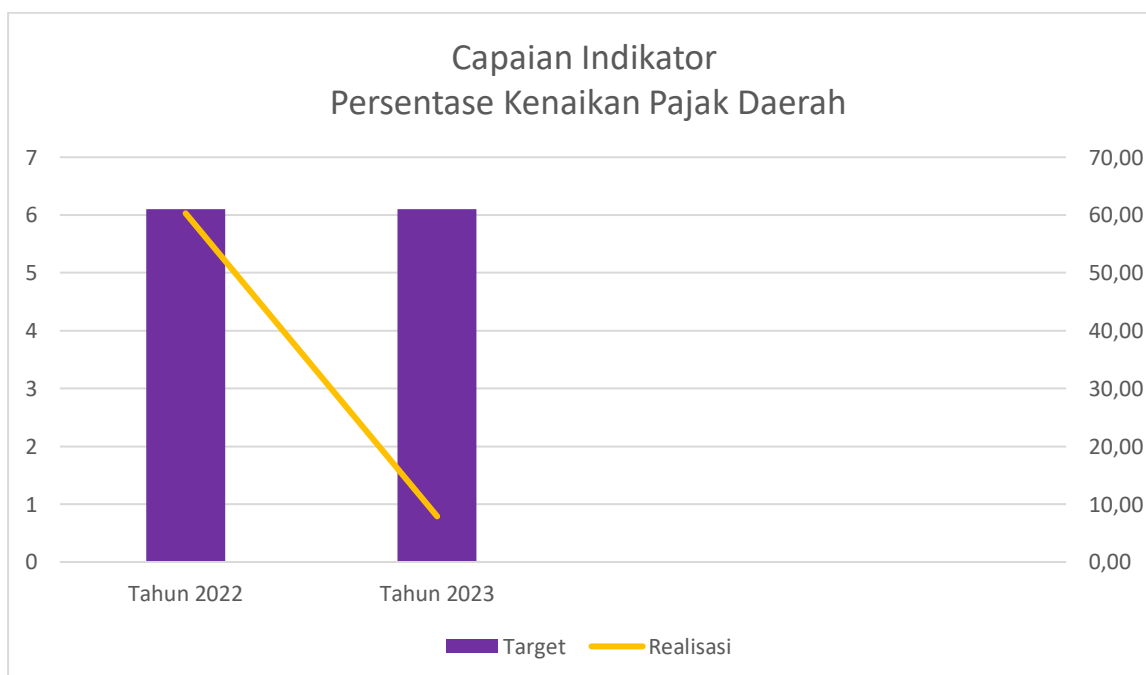
*) Sumber LRA BPKAD Kota Surakarta Tahun 2023

▪ Perhitungan Persentase Capaian Kenaikan Pajak Daerah :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{7,89}{6,1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = 129,34 \%$$



a. Capaian Kinerja

Persentase Kenaikan Pajak Daerah merupakan indikator sasaran program yaitu Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Tabel 3.5 diatas untuk capaian indikator sasaran program Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta pada Tahun 2023 yaitu **Persentase Kenaikan Pajak Daerah** untuk realisasi Tahun 2023 capaiannya menunjukkan predikat **Sangat Berhasil**.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja

Persentase Kenaikan Pajak Daerah yaitu Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2023 bisa dikatakan sangat berhasil karena mencapai **129,34%** dari target yang ditentukan, hal tersebut merupakan keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan meliputi:

1. Peningkatan pengawasan dengan pemasangan alat monitoring pajak *online*;
2. Sosialisasi pajak daerah;
3. Bimtek pelatihan SIMPATDA;
4. Pemetaan dan penghapusan piutang pajak daerah;
5. Pemantauan lapangan pada kegiatan hiburan insidental;
6. Penertiban reklame;
7. Pemasangan banner tarif pajak restoran;
8. Menyediakan layanan informasi kepada publik melalui *WA Center, Website, Videotron* dan Media Sosial (*Instagram dan Youtube*);
9. Menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum;
10. Memberikan hadiah undian kepada wajib pajak daerah yang telah membayar pajak;
11. Pelayanan pajak daerah di *CFD (Car Free Day)*.

c. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas 2 (dua) yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023 realisasi biaya termasuk program pengelolaan pendapatan daerah pada kegiatan pengelolaan pendapatan daerah untuk mendukung sasaran Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah pada indikator Persentase Kenaikan Pajak Daerah adalah Rp. 6.601.025.817,00 sementara target biaya untuk semua program yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 8.339.609.000,00.

Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level indikator sasaran program adalah **79,15%**. Persentase efisiensi ini secara teori dapat diasumsikan bahwa pada Tahun 2023 secara umum terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya biaya.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dalam rangka Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023. Adapun pencapaian dari setiap program/ kegiatan tersebut terdapat pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan program yang mendukung keberhasilan sasaran program yaitu Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah.

Dalam pelaksanaan program ini kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang mendukung sebagai berikut :

1. Kegiatan analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 639.991.000;
2. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 1.162.808.000;
3. Kegiatan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 1.258.760.000;
4. Kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 375.687.000;
5. Kegiatan penagihan pajak daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 2.788.200.000;
6. Kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 631.718.000.

Berikut beberapa dokumentasi dari kegiatan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah :

- 1) Peningkatan pemakaian teknologi informasi dalam pengelolaan pajak.
 - a. Pemasangan *Terminal Monitoring Device* (TMD)



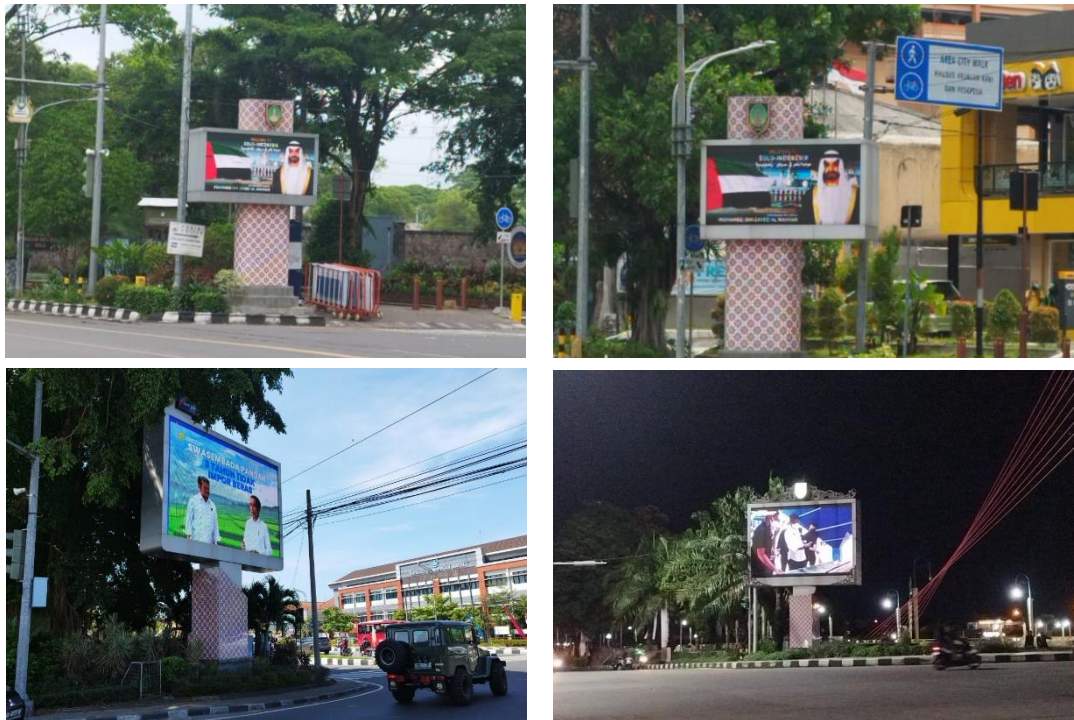
Gambar 3.17 – Kegiatan Pemasangan alat TMD (*Terminal Monitoring Device*)

- b. Penggunaan Sistem Perforasi Online dengan pemberian QR Code pada Tiket Konser/ Hiburan Insidental untuk pemantauan pajak hiburan.



Gambar 3.18 – Kegiatan Monitoring Pajak Hiburan pada Konser Ari Lasso dengan menggunakan Alat Scan QR Code.

- c. Menyediakan layanan informasi kepada publik melalui Videotron.



Gambar 3.19 – Dokumentasi Videotron Bapenda Kota Surakarta

- 2) Pengelolaan sarana dan prasarana sumber pajak daerah penataan dan penertiban titik reklame.



Gambar 3.20 – Kegiatan Pemasangan Stiker dan Penertiban Reklame

- 3) Peningkatan Pengawasan Obyek Pajak dan Penagihan Piutang Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta melaksanakan audit pajak daerah.



Gambar 3.21 – Kegiatan Pengawasan Obyek Pajak Daerah dan Penagihan Piutang Pajak Daerah

4) Menjalinkan Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan Negeri Kota Surakarta dan Satpol PP Kota Surakarta)



Gambar 3.22 – Dokumentasi Menjalinkan Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum



Gambar 3.23 – Pemasangan Banner Tarif Pajak Restoran

5) Pemberian Penghargaan kepada Wajib Pajak, Pengundian dan Penyerahan Hadiah Pajak Daerah PBB-P2 Tahap I dan Tahap II.



Gambar 3.24 – Kegiatan Pengundian Hadiah PBB-P2 bersama Walikota Surakarta



Gambar 3.25 – Kegiatan Penyerahan Hadiah PBB-P2 Tahap I Tahun 2023



Gambar 3.26 – Kegiatan Penyerahan Hadiah PBB-P2 Tahap II Bersama Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Surakarta

Tabel 3.11
PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN PROGRAM KE-2
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

Sasaran Program ke 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik										
Indikator	Satuan	Tahun 2022*			Tahun 2023			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)		Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
Nilai SAKIP	Nilai	85	74,60*	87,7	85	74,60*	87,7	85	100	Sangat Berhasil
Nilai SKM	Angka	91	92,12	101,2	92	92,27	100,29	95	100	Sangat Berhasil
Nilai SPIP	Angka	3,1	2,81	90,6	3,2	3,96	123,75	3,1	100	Sangat Berhasil

- Perhitungan Persentase Capaian **Nilai SAKIP**:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{74,60 *}{85} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = 87,7 \% \quad * \text{Sumber Inspektorat Kota Surakarta Tahun 2022}$$

- Perhitungan Persentase Capaian **Nilai SKM**:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{92,27 *}{92} \times 100\%$$

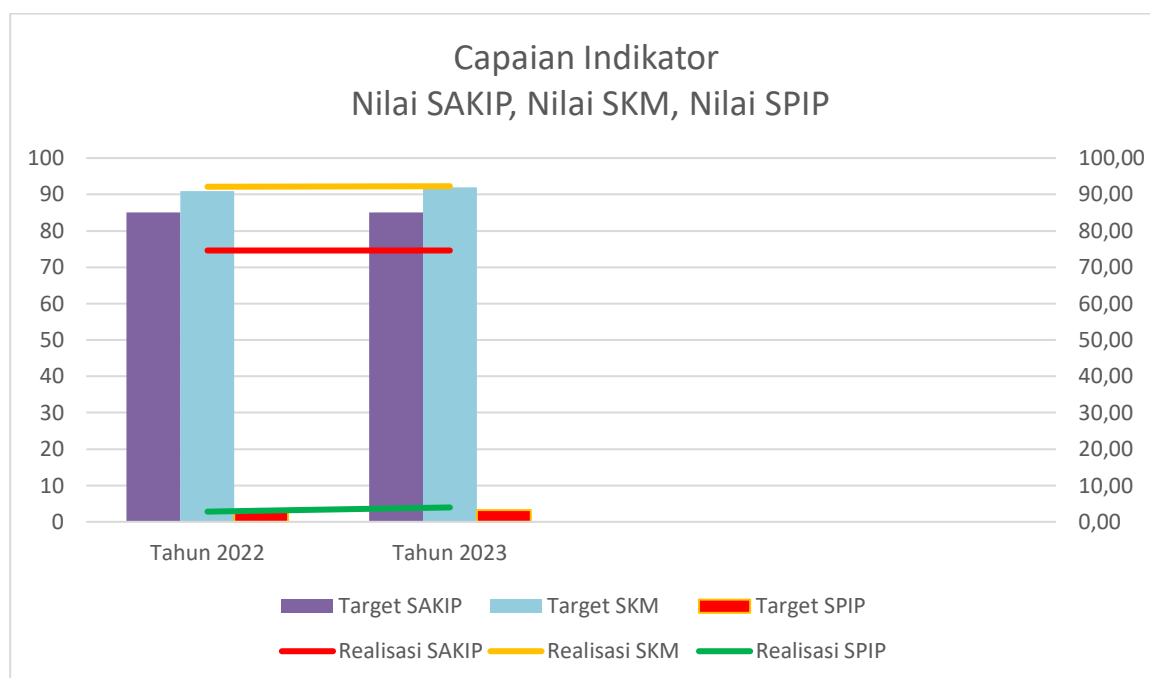
$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = 100,29 \% \quad * \text{Sumber Laporan SKM Bapenda Kota Surakarta Tahun 2023}$$

- Perhitungan Persentase Capaian **Nilai SPIP**:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{3,96 *}{3,2} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = 123,75 \% \quad * \text{Sumber Inspektorat Kota Surakarta Tahun 2023}$$



a. Capaian Kinerja

Berdasarkan Tabel 3.6 diatas Sasaran Program yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik memiliki beberapa indikator kinerja antara lain: **Nilai SAKIP** dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 74,60% dengan capaian 87,76% menunjukkan predikat **Sangat Berhasil**. Indikator kinerja kedua **Nilai SKM** dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 92,27% dengan capaian 100,29% menunjukkan predikat **Sangat Berhasil**. Indikator kinerja ketiga **Nilai SPIP** dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 3,96% dengan capaian 123,75% menunjukkan predikat **Sangat Berhasil**.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik memiliki beberapa indikator kinerja, hal tersebut merupakan keberhasilan atas target indikator kinerja Nilai SAKIP, Nilai SKM dan Nilai SPIP. Faktor keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan yaitu :

1. Terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan sepanjang Tahun 2023;
2. Terpenuhinya seluruh dokumen perencanaan perangkat daerah yang dibutuhkan;
3. Telah dilakukan identifikasi dan analisis resiko strategis pemda, strategis OPD dan operasional OPD.

Faktor penghambat atas target indikator Nilai SAKIP, Nilai SKM dan Nilai SPIP yaitu :

1. Kurangnya peningkatan kapasitas SDM dengan mengikuti diklat/bimtek;
2. Kurang optimalnya penyusunan laporan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana;
3. Belum lengkapnya data dukung yang dibutuhkan;
4. Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi yang terus berkembang.
5. Kurangnya pengembangan inovasi.

c. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas 2 (dua) yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023 realisasi biaya termasuk program penunjang urusan pemerintahan daerah untuk mendukung sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah untuk mendukung indikator Nilai SAKIP, Nilai SKM dan Nilai SPIP adalah Rp. 258.670.500,00 sementara target biaya untuk semua program yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 300.220.000,00. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level indikator sasaran strategis adalah **85,31%**. Persentase efisiensi ini secara teori dapat diasumsikan bahwa pada Tahun 2023 secara umum terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya biaya.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Program penunjang urusan pemerintah Daerah merupakan program yang mendukung keberhasilan sasaran program ke 2 (dua) yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik,

Dalam pelaksanaan program ini terdapat kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang mendukung sebagai berikut :

1. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 50.900.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.700.000,00;
2. Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 244.920.000,00; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 204.020.500,00;
3. Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 7.400.000,00; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.950.000,00;
4. Kegiatan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dengan total anggaran sebesar Rp. 397.098.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 374.753.000,00.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan:

1. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bapenda Kota Surakarta secara triwulanan;
2. Tindak lanjut perbaikan terhadap rekomendasi yang harus ditingkatkan dari hasil SKM;
3. Pemberian *reward/punishment* bagi petugas pelayanan;
4. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi internal Bapenda tentang visi misi dan tujuan organisasi;

5. Pelaksanaan apel pagi secara rutin dalam rangka peningkatan kinerja, kedisiplinan dan sosialisasi program kerja;
6. Standarisasi Operasional Prosedur dan Standarisasi Pelayanan;
7. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah;
8. Melaksanakan pelatihan sistem informasi pajak daerah, Bimtek petugas pelayanan pajak daerah; Bimtek pelayanan prima.

Berikut beberapa dokumentasi dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi:



Gambar 3.27 – Kegiatan Diskusi Kelompok Terbatas Tahun 2023



Gambar 3.28 – Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

C. Realisasi Anggaran

1. Belanja

Untuk realisasi belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta sebesar 68,95% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran
Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PAGU	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	29.638.941.651	19.561.582.627	66,00
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	303.220.000	258.670.500	85,31
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.900.000	48.700.000	95,68
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	244.920.000	204.020.500	83,30
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.400.000	5.950.000	80,41
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.077.830.551	11.296.863.251	59,21
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.072.830.551	11.293.108.251	59,21
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.300.000	3.755.000	70,85
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	846.908.000	776.171.200	91,65
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	368.100.000	330.453.500	89,77
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	397.098.000	374.753.000	94,37
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44.895.000	36.982.500	82,38
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	36.815.000	33.982.200	92,31
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.239.047.100	1.847.088.632	82,49
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.141.000	29.569.800	57,82
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.063.752.100	977.982.500	91,94
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	428.075.000	374.296.754	87,44
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.085.000	38.860.500	43,14
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	407.400.000	279.518.278	68,61
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	130.554.000	96.439.000	73,87
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	68.040.000	50.421.800	74,11

1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.141.000	73.400.000	80,53
	Pengadaan Mebel	91.141.000	73.400.000	80,53
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.850.981.000	4.177.877.546	71,40
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.925.000	20.125.200	46,88
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	346.456.000	286.092.935	82,58
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	390.739.000	162.352.500	41,55
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.070.861.000	3.709.306.911	73,15
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.229.814.000	1.131.511.498	92,01
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	640.696.000	566.173.098	88,37
	Pemeliharaan Mebel	9.895.000	1.698.000	17,16
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	484.790.000	478.925.400	98,79
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94.433.000	84.715.000	89,71
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8.339.609.000		
2.1	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8.339.609.000	6.601.025.817	79,15
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	639.911.000	421.603.475	65,88
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.162.808.000	1.044.022.384	89,78
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	375.687.000	328.412.800	87,42
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.258.760.000	1.018.682.600	80,93
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	1.482.525.000	1.007.306.700	67,95
	Penagihan Pajak Daerah	2.788.200.000	2.378.982.189	85,32
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	631.718.000	402.015.669	63,64
TOTAL		37.978.550.651	26.187.087.373	68,95

Sumber : <https://simdalbangda.surakarta.go.id/>

2. Pendapatan

Untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta mengalami penurunan sebesar - 2,08% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.13
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta
Tahun 2022 dan Tahun 2023

Uraian	APBD-P 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	
				Rp	%
PENDAPATAN DAERAH	2.107.639.828.588	1.808.345.970.249	1.785.706.225.460	(22.639744.789)	(1,25)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	782.497.439.588	647.440.585.331	634.013.767.586	(13.426.817.745)	(-2,08)
Pajak Daerah	524.045.000.000	408.526.805.553	441.597.304.536	33.070.498.983	8,10
Pajak Hotel	53.500.000.000	43.221.399.573	53.792.877.500	10.571.477.927	24,46
Pajak Restoran	87.500.000.000	71.439.742.891	85.320.524.900	13.880.782.009	19,43
Pajak Hiburan	23.500.000.000	13.103.628.176	20.338.506.300	7.234.878.124	55,21
Pajak Reklame	20.000.000.000	16.580.635.700	18.404.364.600	1.823.728.900	11
Pajak Penerangan Jalan	68.000.000.000	65.404.527.415	70.356.002.036	4.951.474.621	7,57
Pajak Parkir	8.000.000.000	5.613.907.600	6.821.745.800	1.207.838.200	21,52
Pajak Air Bawah Tanah	6.000.000.000	5.340.664.500	5.742.067.700	401.403.200	7,52
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	103.545.000.000	91.801.736.298	91.104.444.600	(697.291.698)	(-0,76)
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	154.000.000.000	96.020.563.400	89.716.771.100	(6.303.792.300)	(-6,57)
Retribusi Daerah	80.673.058.580	60.834.204.386	60.183.760.238	(1.606.408.137)	(-2,64)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.397.255.689	15.295.029.480	16.288.197.110	993.167.630	6,49
Lain-lain PAD yang Sah	161.382.125.319	162.659.357.928	117.369.742.229	(45.289.615.699)	(27,84)
Pendapatan Transfer	1.324.242.388.999	1.376.198.105.714	1.150.792.457.874	(225.405.647.840)	(16,38)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.103.812.322.000	1.187.466.894.100	993.835.615.191	(193.631.278.909)	(16,31)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	220.430.066.999	188.731.221.614	156.956.842.683	(31.774.378.931)	(16,84)

Sumber: LRA BPKAD Kota Surakarta Tahun 2023

Realisasi belanja sebesar Rp 26.187.087.373 (68,95%) dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan dengan prioritas peningkatan pajak daerah, sehingga berdampak pada kenaikan realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 441.597.304.536 (8,10%).

D. Pencapaian Lainnya

Penghargaan Gelar Inovasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2023, memperoleh penghargaan sebagai SKPD dengan kategori juara umum stand terbaik dalam gelaran acara tersebut.



Gambar 3.29 – Dokumentasi Penghargaan Gelar Inovasi dari Pemerintah Kota Surakarta

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Capaian Tahun 2023

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta ini disusun agar dapat menjadi cerminan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta selama Tahun 2023, sehingga diharapkan dapat bermanfaat untuk langkah evaluasi dan perbaikan kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang. LKjIP ini menyajikan informasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dan RPJMD Pemerintah Kota Surakarta.

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis berdasarkan target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 tercapai dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Indikator kinerja sasaran Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, persentase capaian kinerja sebesar 101,13% kategori **sangat berhasil**;
- 2) Indikator kinerja sasaran Persentase Kenaikan Penerimaan PAD, persentase capaian kinerja sebesar -34,10% kategori **tidak berhasil**;
- 3) Indikator kinerja sasaran Nilai PMPRB, persentase capaian kinerja sebesar 97,92% kategori **sangat berhasil**;
- 4) Indikator kinerja sasaran Persentase Kenaikan Pajak Daerah, persentase capaian kinerja sebesar 129,34% kategori **sangat berhasil**;
- 5) Indikator kinerja sasaran Nilai SAKIP, persentase capaian kinerja sebesar 87,7% kategori **sangat berhasil**;
- 6) Indikator kinerja sasaran Nilai SKM, persentase capaian kinerja sebesar 100,29% kategori **sangat berhasil**;
- 7) Indikator kinerja sasaran Nilai SPIP, persentase capaian kinerja sebesar 123,75% kategori **sangat berhasil**.

Dari capaian diatas maka Tahun 2023, berdasarkan skala pengukuran Bapenda Kota Surakarta termasuk kategori **sangat berhasil** dan untuk Indikator Persentase Kenaikan Penerimaan PAD mengalami penurunan sebesar -2,08% dari penerimaan PAD Tahun 2022 sebesar Rp 647.457.638.653,- dan penerimaan PAD Tahun 2023 sebesar Rp 634.013.767.586,-.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda Kota Surakarta adalah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah capaian kinerja sasaran strategis dengan target Tahun 2023 sebesar 32% dan capaian realisasi sebesar 101,13%. Berikut faktor pendorong capaian kinerja sasaran strategis Bapenda Kota Surakarta, yaitu:

- a. peningkatan koordinasi kerjasama antar unit terkait (SKPD Pengelola Retribusi, DJP, KPP Pratama, Kejaksaan, dan Polri);
- b. mengintensifkan upaya jemput bola ke wajib pajak melalui layanan Safari PBB-P2 di 54 Kelurahan dan layanan pajak daerah di CFD (*Car Free Day*);
- c. penyederhanaan prosedur dan modernisasi elektronifikasi system perpajakan dan retribusi daerah;
- d. penyempurnaan landasan hukum peraturan pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. peningkatan pengawasan pemungutan pendapatan daerah;
- f. pemberian hadiah bagi wajib pajak yang tertib membayar pajak.

Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi Bapenda Kota Surakarta yaitu: adanya motif penghindaran pembayaran pajak daerah yang dilakukan oleh wajib pajak, keberatan terhadap penetapan pajak daerah, tidak sinkronnya data yang diperoleh dilapangan dengan data yang dilaporkan secara online, pemilik objek pajak daerah kurang kooperatif dan tidak menyajikan data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan penagihan piutang pajak daerah kurang optimal.

3. Total Efisiensi Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Bapenda Kota Surakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 51.006.523.634,- melalui mekanisme anggaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp 37.978.550.651,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 26.187.087.373,- (68,95%). Angka realisasi tersebut menunjukkan jika ada efisiensi sebesar Rp 11.791.463.278,- atau 31,05% dari anggaran yang disediakan.

Rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 tetap masih melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pendapatan Pajak Daerah dengan beberapa upaya, antara lain:

- a. pemutakhiran basis data perpajakan daerah;
- b. pendekatan persuasif kepada wajib pajak;
- c. pemberian keringanan pajak daerah;
- d. jemput bola / safari PBB-P2 kepada Wajib Pajak untuk pelayanan pembayaran dan perubahan data PBB di 54 kelurahan ;
- e. melaksanakan undian pajak daerah;
- f. memberikan souvenir kepada wajib pajak;
- g. membentuk tim penertiban pajak daerah;
- h. digitalisasi peta parsial PBB yang terintegrasi dengan zona nilai tanah BPN dan *history* PPh atas penjualan tanah;
- i. integrasi perubahan data SPPT PBB-P2 dengan pencatatan SHM tanah di BPN; dan
- j. optimalisasi update data pajak daerah (wajib pajak dan objek pajak) melalui penilaian individual, satu data retribusi dan pajak daerah dalam satu petak.

Dengan pelaksanaan atas upaya-upaya peningkatan pendapatan pajak daerah tersebut di atas, maka diharapkan Pemerintah Kota Surakarta dapat mencapai Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang ditargetkan. Sehingga, pelaksanaan pembangunan Kota Surakarta dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

B. Strategi Peningkatan Kinerja ke Depan

1. Strategi dalam perencanaan berikutnya untuk mendukung pencapaian kinerja berdasarkan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026

Beberapa strategi yang perlu dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta untuk meningkatkan capaian kinerja dan akuntabilitas secara keseluruhan, antara lain :

- 1) Meningkatkan keselarasan dokumen-dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan Renja), anggaran (RKA/DPA), dan kinerja (Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) secara bertahap sesuai dengan siklus perencanaan, yaitu mengupayakan sebagian Indikator Kinerja Utama dapat menjadi indikator kinerja tiap tahun;
- 2) Penentuan skala prioritas program dan kegiatan yang lebih tepat;
- 3) Penyesuaian target kinerja pendapatan dan belanja;
- 4) Melakukan pengukuran secara periodik terhadap hasil capaian kinerja sebagai bahan pengendali pencapaian kinerja pada akhir tahun anggaran agar upaya pencapaian target kinerja dapat optimal;

- 5) Menajamkan program / kegiatan yang mengarah pada pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD agar pelaksanaan program / kegiatan efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- 6) Mempertimbangkan kendala faktor eksternal (analisis resiko) agar pelaksanaan program / kegiatan berjalan lancar dan pencapaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan.
- 7) Pengembangan inovasi strategi peningkatan pendapatan pajak daerah, diantaranya:
 - a. pemeliharaan aplikasi *billing center*;
 - b. pemeliharaan aplikasi e-BPHTB;
 - c. pemeliharaan aplikasi e-Layanan;
 - d. pemeliharaan e-Potensi;
 - e. pemeliharaan jaringan pajak daerah;
 - f. pemeliharaan simpatda; dan
 - g. pemeliharaan aplikasi peforasi elektronik.

2. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Aktivitas Prioritas Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Aktivitas	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		6.706.380.000
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		6.706.380.000
	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		417.500.000
		Bimtek Petugas Pelayanan Pajak Daerah	22.500.000
		Rapat Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	25.000.000
		Monev Pendapatan Daerah	60.000.000
		Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah	190.000.000
		Tim Visit Bersama	20.000.000
		Kajian Proyeksi PAD	100.000.000

	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		1.272.080.000
		Banner	190.0000
		Cetak SPPT PBB-P2	190.000.000
		Pembuatan Konten Sosial Media Bapenda	100.680.000
		Pembuatan Konten Videotron	75.000.000
		Pemeliharaan Directory Board	50.000.000
		Pemeliharaan Jaringan CCTV	25.680.000
		Pemeliharaan Neon Box	50.680.000
		Pemeliharaan Panggung Spanduk	100.680.000
		Pemeliharaan Peralatan Ruang Kendali	50.680.000
		Pemeliharaan Printer Printonik	75.000.000
		Pemeliharaan Vertical Banner	100.000.000
		Pemeliharaan Videotron	150.000.000
		Pemeliharaan Website	50.680.000
		Penjilidan DHKP dan NJOP SPPT PBB-P2	18.000.000
		Tonner/ Pita Printer SPPT PBB-P2	45.000.000
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		278.000.000
		Rapat Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	25.000.000
		Pemantauan/Observasi Lapangan	30.000.000
		Pengadaan Kartu NPWPD	2.500.000

	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		156.360.000
		Rapat Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	25.000.000
		Pelatihan Sistem Informasi Pajak Daerah	30.000.000
		Pemeliharaan Aplikasi e-Potensi	50.680.000
		Pemeliharaan Sistem/ Aplikasi Perforasi Elektronik	50.680.000
	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah		883.000.000
		Cetak Brosur Informasi Pelayanan Pajak Daerah	75.000.000
		Kegiatan Pemilahan dan Penyampaian SPPT PBB-P2	733.000.000
		Rapat Penetapan Wajib Pajak Daerah	45.000.000
		Sosialisasi Penyampaian SPPT PBB-P2	30.000.000
	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah		2.652.000.000
		Gathering Wajib Pajak Daerah	500.000.000
		Hadiah Undian PBB-P2	810.000.000
		Hadiah Subjek Pajak Daerah Tahap I s.d IV	465.000.000
		Safari PBB-P2	50.000.000
		Rapat Penagihan Pajak Daerah	27.000.000
		Pakaian Dinas Lapangan dan Perlengkapannya Untuk Penertiban Pajak Daerah	90.000.000
		Pengundian Hadiah PBB-P2	70.000.000
		Penyampaian Hadiah Undian PBB-P2	20.000.000
		Souvenir Untuk Safari PBB-P2	190.000.000
		Souvenir Untuk Wajib Pajak Daerah	190.000.000
		Souvenir Untuk Wajib PBB-P2	190.000.000

		Optimalisasi Penagihan dengan Penegak Hukum atau PPNS	50.000.000
	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		617.000.000
		Alat Keselamatan Petugas Penertiban Pajak Daerah	25.000.000
		Alat Pendukung Sarana Prasarana dan Penertiban Pajak Daerah	25.000.000
		Asistensi Penelitian dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah	10.000.000
		Cetak MMT	190.000.000
		Coaching/ Pendampingan Penelitian dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah	10.000.000
		Expose Hasil Penelitian dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah	10.000.000
		Rapat Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	27.000.000
		Penelitian dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah	100.000.000
		Pengawasan/ Penertiban Pajak Daerah	120.000.000
		Stiker Penertiban Pajak Daerah	100.000.000
	Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pajak Daerah		650.440.000
		Langganan WA Broadcast	100.000.000
		Pemeliharaan Aplikasi e-BPHTB	50.680.000
		Pemeliharaan Aplikasi e-Layanan	50.680.000
		Pemeliharaan Aplikasi ESPTPD	50.680.000
		Pemeliharaan Aplikasi pada Mesin Anjungan Pelayanan Mandiri Pajak Daerah	50.680.000
		Pemeliharaan Jaringan Pajak Daerah	50.680.000
		Pemeliharaan Server Pajak Daerah	70.680.000
		Pemeliharaan Sistem Informasi Maintenance Database Pajak Daerah	75.680.000

		Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	100.000.000
		Pemeliharaan Sistem Informasi PBB Online	50.680.000

Surakarta, Januari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA



TULUS WIDAJAT, SE., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720407 199703 1 005

**LAMPIRAN LKjIP
BAPENDA KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN	2.107.639.828.588,53	1.820.949.271.413,00	86,40	2.028.438.691.045,88
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	782.497.439.588,83	635.645.467.613,00	81,23	647.440.585.331,88
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	524.045.000.000,00	441.128.031.998,00	84,18	408.526.805.553,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	80.673.058.580,00	60.048.644.631,00	74,43	60.959.392.370,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16.397.255.689,83	16.638.197.110,00	101,47	15.295.029.480,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	161.382.125.319,00	117.830.593.874,00	73,01	162.659.357.928,88
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.324.242.388.999,70	1.184.403.803.800,00	89,44	1.376.198.105.714,00
4.2.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	1.103.812.322.000,00	993.835.615.191,00	90,04	1.156.908.079.100,00
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil	56.464.671.000,00	62.774.864.116,00	111,18	54.966.001.580,00
4.2.01.02	Dana Alokasi Umum	809.189.028.000,00	809.121.510.137,00	99,99	776.550.616.614,00
4.2.01.03	Dana Alokasi Khusus	238.158.623.000,00	121.939.240.938,00	51,20	325.391.460.906,00
4.2.02	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	0,00	0,00	0	30.558.815.000,00
4.2.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0	30.558.815.000,00
4.2.03	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	220.430.066.999,70	190.568.188.609,00	86,45	188.731.211.614,00
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	181.427.066.999,70	159.106.877.609,00	87,70	165.478.211.614,00
4.2.03.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	39.003.000.000,00	31.461.311.000,00	80,66	23.253.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00	4.800.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00	4.800.000.000,00
5	BELANJA	2.355.070.413.357,41	1.959.457.007.435,00	83,20	2.087.823.395.600,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.920.658.910.684,92	1.595.191.330.248,00	83,05	1.700.583.774.120,00
5.1.01	Belanja Pegawai	774.437.912.289,37	707.716.308.696,00	91,38	719.927.785.645,00
5.1.02	Belanja Barang	1.011.112.191.015,55	806.351.304.430,00	79,75	852.358.150.533,00
5.1.05	Belanja Hibah	113.410.083.380,00	61.030.446.622,00	53,81	81.301.317.592,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21.698.724.000,00	20.093.270.500,00	92,60	46.996.520.350,00
5.2	BELANJA MODAL	430.411.502.672,49	361.492.308.169,00	83,99	380.832.881.832,00
5.2.01	Belanja Tanah	1.467.950.000,00	1.359.133.500,00	92,59	3.267.440.650,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	93.861.743.323,94	72.091.924.910,00	76,81	89.581.025.884,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	251.709.091.909,55	219.662.307.758,00	87,27	142.322.295.504,00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.018.713.100,00	63.291.155.486,00	85,51	140.614.191.463,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.989.744.339,00	5.018.580.115,00	55,83	5.047.928.331,00
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	364.260.000,00	69.206.400,00	19,00	0,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	4.000.000.000,00	2.773.369.018,00	69,33	6.406.739.648,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	4.000.000.000,00	2.773.369.018,00	69,33	6.406.739.648,00
6	TRANSFER	0,00	0,00	0	500.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
6.1	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	0,00	0,00	0	500.000.000,00
6.1.03	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0	500.000.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(247.430.584.768,88)	(138.507.736.022,00)	0	(59.884.704.554,12)
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	254.430.584.768,88	254.430.584.768,88	100,00	314.315.289.323,00
7.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	254.430.584.768,88	254.430.584.768,88	100,00	314.315.289.323,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	0,00
7.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	247.430.584.768,88	247.430.584.768,88	100,00	314.315.289.323,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(0,00)	108.922.848.746,88	0	254.430.584.768,88

